

Implementation of a Regional Property Management Information System (Sim-Bmd) in Realizing Transparency and Accountability (Interpretative Study on Sidoarjo Regency Government)

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Sim-Bmd) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Interpretatif Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)

Desi Nur Mayasari ¹⁾, Sarwenda Biduri ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to find out how the Regional Property Management Information System (SIM-BMD) is implemented in realizing transparency and accountability. The data sources used in this research are primary data, secondary data with data collection techniques, namely in-depth interviews, observations, documentation studies which are then analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the research show that the SIM-BMD application is implemented by the Sidoarjo Regency Government as an application. Integrated asset management is quite good at helping the government manage regional property. The implementation of the regional property management information system (SIM-BMD) in realizing transparency and accountability in the Sidoarjo district government has been good. However, what happens in the field is that data differences are often found in asset reports in a region. The SIM-BMD Transparency and Accountability implemented by the Sidoarjo Regency Government is going quite well, but needs development and updating to make its use more effective.*

Keywords – Implementation; SIM BMD; Transparency; Accountability

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIM-BMD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIM-BMD diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk aplikasi. Pengelolaan aset terpadu cukup baik dalam membantu pemerintah mengelola kekayaan daerah. Penerapan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah (SIM-BMD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan kabupaten Sidoarjo sudah baik. Namun yang terjadi di lapangan, sering ditemukan perbedaan data pada laporan aset suatu daerah. Transparansi dan Akuntabilitas SIM-BMD yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berjalan cukup baik, namun perlu pengembangan dan pembaruan agar lebih efektif dalam penggunaannya.*

Kata Kunci – Implementasi; SIM BMD; Transparansi; Akuntabilitas

I. PENDAHULUAN

Dengan berlakunya UU No. 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan pemerintahan daerah telah berubah secara mendasar, dari sisi politik, administrasi, teknis, dan finansial serta ekonomi, dalam rangka menghadapi berbagai perubahan dalam pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan penataan manajemen pemerintahan agar bisa bekerja lebih efektif, efisien, dan ekonomis [1]. Namun seringkali ditemukan bahwa terkait pengelolaan Barang Milik Daerah masih ditemukan tidak adanya penerapan regulasi pengelolaan barang milik daerah hingga berakibat tidak tertibnya pencatatan dan belum ada data yang valid. Selain itu, keterbatasan SDM dan kurang terlatihnya kompetensi serta susahnyanya menghapus budaya korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Pada akhirnya, aset daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah masih kurang optimal baik dari segi pemanfaatan dan penggunaannya. Beberapa imbasnya antara lain adalah dari sisi ekonomi, yakni tidak terdapat pendapatan yang seimbang dengan jumlah aset yang dimiliki. Sementara itu, dampak lainnya yaitu dari keamanan, hukum terhadap barang yang tidak diadministrasikan dengan baik, misalnya ketidaklengkapan dokumen kepemilikan yang berakibat banyaknya kehilangan aset milik Pemerintah

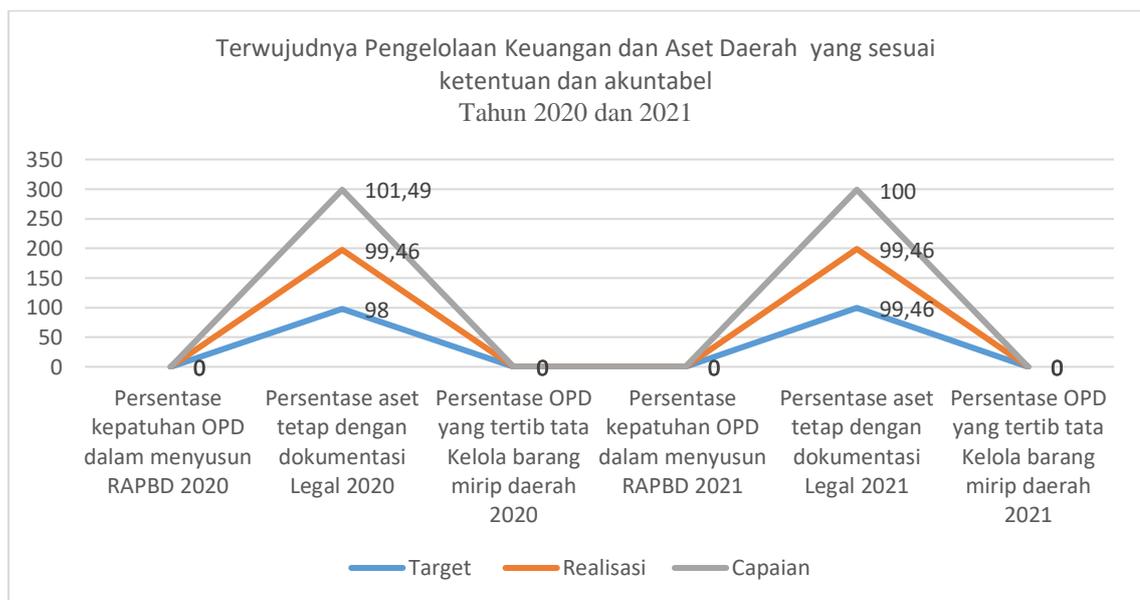
Di era globalisasi ini, Pemerintah menghadapi berbagai permasalahan antara lain adalah bagaimana menyelenggarakan sistem pemerintahan yang bersih (*clean governance*), guna mengantisipasi tingginya tuntutan Demokratisasi, Desentralisasi, serta Globalisasi yang semakin besar. Salah satu usaha dalam rangka menghadapi beragam tantangan tersebut yaitu adanya kepatuhan dalam mengaplikasikan nilai luhur peradaban negara serta

berbagai prinsip tata pengelolaan pemerintah yang baik dalam mewujudkan cita-cita yang dicapai serta tujuan bangsa seperti yang dimandatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 [2].

Manajemen aset dengan pengelolaan yang baik seharusnya dapat mendorong pengelolaan aset lebih efektif dan efisien, sehingga Pemerintah bertanggung jawab untuk mengamankan barang milik daerah (BMD) [3]. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 mengenai petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah, pengertian dari Pengamanan merupakan kegiatan atau upaya mengontrol pengelolaan barang milik daerah berupa keamanan administrasi, keamanan fisik, dan keamanan hukum. Untuk pengamanan administrasi, dibutuhkan sistem pengadministrasian yang dapat mengendalikan (*controlling*) Barang Milik Daerah. Disamping difungsikan sebagai sarana pengendalian, sistem pengadministrasian tersebut juga harus mampu untuk memenuhi kepentingan pengelolaan Pemerintah baik dalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pengembangan serta penghapusan barang milik daerah.

Kendala utama yang ditemui Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pengamanan BMD disamping kurangnya SDM yang kompeten ialah masih rendahnya penegasan terhadap regulasi terkait. Sehingga mengakibatkan timbulnya beragam persoalan dalam pengamanan Barang Milik Daerah. Beragam persoalan tersebut yakni aset tanah belum bersertifikat, aset berupa tanah yang memiliki dokumen resmi tetapi belum tercatat di aset daerah, adanya aset yang diakui oleh pihak – pihak lain, aset yang tidak ditemukan keberadaannya, serta lambatnya penanganan kelengkapan berkas pemilikan aset.

Berikut merupakan Kurva Pencapaian Kinerja Program Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dan Tahun 2021 [4].



Gambar 1. Capaian Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan kurva di atas, indikator capaian kinerja persentase aset tetap yang memiliki legalitas hukum pada triwulan II telah tercapai akan tetapi masih ditemukan kendala/masalah yakni masih banyak jumlah bidang tanah yang tidak memiliki sertifikat dan Kepala OPD sebagai Pengguna Barang belum maksimal mengupayakan dalam mengamankan secara hukum dan administrasi atas aset-aset yang dibawahinya [4]. Dari fenomena tersebut, terdapat beberapa rencana tindak lanjut serta usaha untuk meningkatkan kinerja persentase aset tetap bersertifikat, diantaranya adalah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan kelengkapan syarat – syarat mengurus sertifikat, koordinasi dengan BPN mengenai upaya mempercepat mengurus sertifikat tanah milik Pemkab Sidoarjo, dibentuknya tim dalam menyelesaikan status kepemilikan Barang Milik Daerah Kabupaten, serta mengikuti diklat pengelolaan aset tetap bagi para pengelola. Proses dalam meningkatkan transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan laporan sebaiknya terdapat keterbukaan sumber keuangan maupun jumlahnya. Rincian dalam laporan keuangan serta pertanggungjawaban harus ditunjukkan dengan jelas agar para pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihatnya dengan jelas [5].

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk upaya untuk menyeragamkan langkah serta tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah ini telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut adalah untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, penertiban administrasi aset, serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas pemakaian barang milik daerah [6]. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) berdasarkan akrual, akan lebih terstruktur dan lebih baik dalam manajemen keuangan seiring tuntutan pada era globalisasi, yaitu akuntabilitas dan transparansi [7].

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi yang dikembangkan sudah dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada dasarnya, sebagian besar bentuk pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat ialah perkara – perkara yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian beragam data, pengetahuan, dan informasi kebijakan serta penyampaiannya kepada seluruh anggota masyarakat yang memerlukan. Jadi jelas bahwa teknologi yang sangat cocok untuk diaplikasikan adalah teknologi informasi.

Sistem aplikasi SIM-BMD ini merupakan suatu program aplikasi yang dipergunakan untuk memproses pencatatan barang milik daerah dengan cara komputerisasi guna menyelaraskan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku [8]. Sistem Informasi Manajemen barang Milik Daerah atau SIM-BMD adalah termasuk salah satu dari banyak jenis Sistem Informasi Manajemen yang cukup banyak dipakai di Pemerintah Daerah [9]. Termasuk satu dari banyak Pemerintah Daerah yang menerapkan SIM-BMD adalah Pemda Kabupaten Sidoarjo. Penggunaan SIM-BMD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset [10]. Dari SIM-BMD ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah hingga tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD)[11]. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu daerah yang telah mengimplementasikan SIM-BMD dalam pengelolaan barang milik daerah. Penggunaan aplikasi SIM-BMD mampu mendorong kesiapan infrastruktur teknologi informasi [12]. Aplikasi SIM-BMD digunakan dalam membantu mengelola aset daerah agar data yang disajikan akurat [13].

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari penelitian terdahulu yang mempunyai tema penelitian yang sejenis berkaitan dengan manajemen aset daerah. Misalnya penelitian yang berjudul Efektivitas pengamanan aset dalam mewujudkan akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. Kesimpulan dari penelitian itu menyebutkan bahwa penerapan terkait keamanan aset di Pemerintah Kota Surabaya baik secara administratif, fisik, dan hukum tidak efektif namun akuntabel. Namun, ketidak efektifan penerapan keamanan aset di Pemerintah Kota Surabaya dapat dipertanggung jawabkan pada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah. Bentuk pertanggung jawaban itu berwujud data inventaris aset yang tertera dalam SIM-BMD, laporan hasil proyek pengadaan instalasi pagar pada aset tanah, dan adanya laporan gugatan atas sengketa aset tanah yang dilayangkan kepada Pemkot Surabaya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kegiatan pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya baik secara administratif, fisik, serta hukum tidak berjalan secara efektif tetapi dapat dipertanggungjawabkan [14].

Hal tersebut senada dengan penelitian terdahulu dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah. Dalam Pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa manajemen BMD pada aplikasi SIM-BMD telah berjalan secara efektif, hal ini berdasarkan dari hasil kuesioner yang telah dilakukan pengolahan terhadap 43 responden dari penatausahaan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak yang menggunakan aplikasi SIMDA BMD dengan jumlah skor capaian sebesar 8.684 sedangkan jumlah skor ideal sebesar 10.492 maka interpretasi skor yang diperoleh sebesar 82% atau masuk dalam kategori sangat efektif [15]. Dengan adanya penerapan transparansi dan akuntabilitas kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan harapan menghasilkan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah secara transparan dan akuntabel guna mencapai pelaporan keuangan serta aset daerah yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [16]. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM- BMD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu dengan pendekatan studi kasus eksploratoris [17]. Dimana studi eksploratoris ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pada satu objek penelitian[18]. Pengertian dari penelitian kualitatif adalah pemahaman terhadap suatu fenomena secara khusus dengan menggunakan pendekatan naturalistik [19].

Pada pembahasan ini, dapat ditarik kesimpulan yakni Pendekatan Penelitian Kualitatif merupakan pendekatan penelitian dengan teknik menelusuri lebih dalam sesuatu hal serta memperluas kumpulan informasi dengan menelaah kejadian di sekitar guna membantu memperjelas serta mengilustrasikan masalah yang akan diteliti [20]. Sejalan dengan hal tersebut, untuk menggambarkan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIM-BMD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta strategi yang dilaksanakan guna mengubah serta meningkatkan kinerja sistem informasi supaya memberikan manfaat lebih dalam implementasinya.

Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini meliputi observasi, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode kualitatif oleh peneliti dikarenakan dalam hal ini, penyajian langsung dilakukan oleh peneliti dan sumber informasi. Penelitian deskriptif ialah jenis penelitian yang menguji coba dengan mendeskripsikan secara

runtut mengenai situasi, permasalahan, kejadian, layanan atau program. Penelitian ini mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar. Dengan demikian, hasil penelitian berisikan beberapa kutipan data serta memberikan deskripsi penyajian laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah [21].

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena membantu mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Fokus penelitian adalah beberapa rangkaian permasalahan yang didefinisikan sebagai inti pembahasan dalam sebuah penelitian. Dengan demikian, diharapkan agar penelitian ini memiliki fokus penelitian yang tepat, hingga dapat menghimpun data dan melakukan analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. [22]. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian pada :

1. Penerapan SIM BMD
2. Kendala penerapan SIM -BMD
3. Manfaat dan dampak penerapan SIM BMD pada transparansi dan akuntabilitas

Keterkaitan dan pembaruan SIM BMD

Informan

Penentuan informasi pada penelitian kali ini adalah pihak - pihak terkait yang mempunyai informasi kunci terkait pengelolaan Barang Milik Daerah serta mengetahui kebenaran data dan terpercaya[23]. Adapun informan kunci dan pendukung pada penelitian ini meliputi :

Tabel 1. Informan kunci dan informan pendukung

No	Kode Informa	Jabatan
1	IK1	Kepala Bagian Umum selaku Pejabat Penatausahaan Barang Setda Kab. Sidoarjo
2	IK2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian selaku Pengurus Barang Setda Kab. Sidoarjo
3	IK3	Pembantu Pengurus Barang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sidoarjo
4	IK4	Pembantu Pengurus Barang Bagian Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo
5	IP1	Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan Upaya strategis atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah memperoleh data [24]. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data primer maupun data sekunder. Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objek penelitian, atau juga diartikan sebagai sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberikan kepada peneliti. Sehingga peneliti diharuskan untuk mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Data primer merupakan data utama, sehingga keberadaannya wajib untuk membantu memecahkan rumusan masalah [25]. Data primer diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan informan dan observasi secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang valid. Sedangkan data sekunder adalah jenis data penelitian yang telah dikumpulkan tidak secara langsung oleh peneliti dari lapangan[26]. Data dimaksud adalah data sebagai pendukung proyek penelitian, pendukung data primer, dan sebagai pelengkap data primer. Sebagai pendukung untuk melengkapi data primer penelitian, peneliti bertugas sebagai pengumpul data dengan mempelajari berbagai jenis buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, jurnal penelitian, atau artikel yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi [27] :

a. Wawancara mendalam (*indept interview*)

Dalam tahap ini, beberapa *key informan* (informasi kunci) diwawancara oleh peneliti menggunakan *snow ball technique*. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan lainnya yang untuk memberikan gambaran secara jelas dan runtut. Wawancara dilakukan secara informal, interaktif dalam artian disusun dalam bentuk dialog secara bebas atau tidak terikat, dan secara terbuka tetapi mendalam. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan 2 teknik yakni semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur guna memperdalam data dan dibandingkan dengan teori – teori substantif terkait.

b. Observasi atau pengamatan (*Observation*)

Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis observasi [28] yakni Observasi partisipatif yang bertujuan untuk melakukan pengamatan lebih dalam terkait objek penelitian, Observasi terstruktur atau tersamar untuk menghindari akses data observasi yang masih bersifat rahasia. Dan jenis observasi yang terakhir adalah observasi tidak terstruktur, yaitu observasi dengan tidak menggunakan instrument baku, akan tetapi observasi tidak

terstruktur yaitu observasi yang tidak menggunakan instrumen baku, akan tetapi berupa rambu observasi guna membatasi latar belakang penelitian.

c. Studi Dokumentasi (study of document)

Dokumentasi dimaksud adalah berupa laporan mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM- BMD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini, Teknik yang digunakan untuk menilai reliabilitas dan validitas adalah dengan menggunakan *triangulation test*. *Triangulation test* merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan data dari luar untuk mengkroscek dan sebagai pembanding [29].

Dalam penelitian ini, hasil dokumentasi atas penyajian laporan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM- BMD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan ditriangulasikan dengan pengamatan dan wawancara kepada pihak – pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Barang Milik daerah. Dimana dari hasil pengamatan tersebut akan dilakukan *cross check* data dokumentasi maupun hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Penggunaan analisis data oleh peneliti dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data kualitatif. Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dalam setiap tahapan penelitian, sehingga data diperoleh hingga selesai dan sempurna [24].

Reduksi data antara lain dalam bentuk merangkum, serta memilih suatu hal yang menjadi pokok bahasan, serta mengacu pada fokus penting dalam menentukan tema maupun penggunaan pola [30]. Kemudian data yang telah direduksi dapat memperjelas suatu gambaran serta mempermudah dalam pengumpulan data berikutnya. Reduksi data dalam penelitian ini, dilakukan sejak penelitian berlangsung untuk memudahkan dalam menentukan informasi-informasi yang digunakan dalam penelitian kemudian untuk mendeskripsikan terkait Pengelolaan aset yang diperlukan selanjutnya untuk mendeuntuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, supaya mendapatkan data yang benar – benar valid. Penyajian data penelitian ini dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan sejenisnya. Terdapatnya penyajian data tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam memahami yang sedang terjadi dan merencanakan strategi penyelesaian melihat dari yang telah dipahami. Data disusun menjadi lebih sederhana dengan dijelaskan dalam bentuk uraian singkat, tabel, serta gambar untuk mempermudah proses informasi dari hasil penelitian yang diperoleh dan menjelaskan tindakan yang dilakukan berdasarkan pemahaman yang diperoleh.

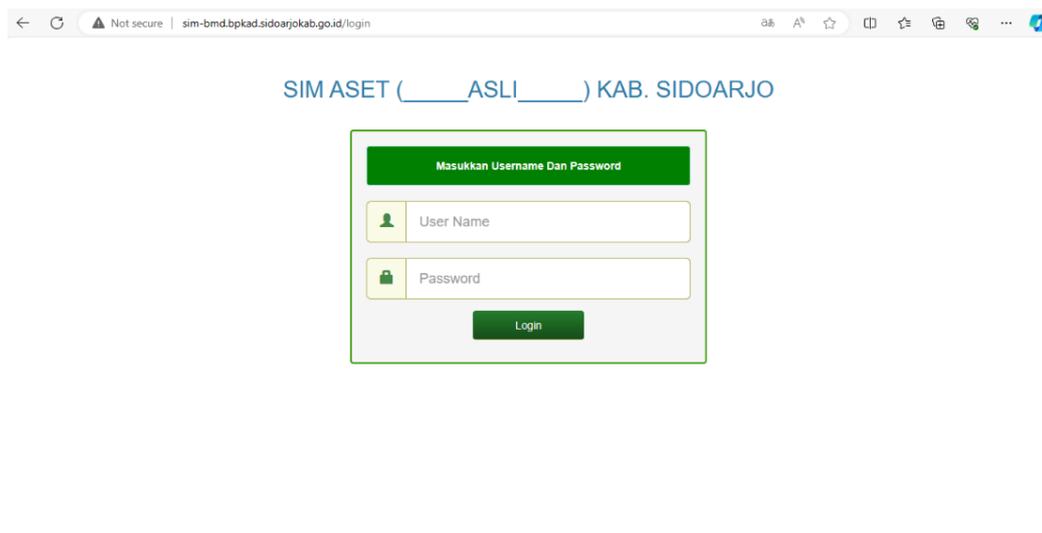
Pada penelitian ini, kesimpulannya adalah untuk menjawab rumusan masalah terkait apa yang terjadi pada pengamanan aset untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten. Peneliti mengkroscek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain [1]. pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Penggunaan triangulasi sumber sebagai pemeriksa sekaligus pembanding data yang sama dari sumber data satu dengan sumber data yang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BUD)

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah ialah dengan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD), dimana dibutuhkan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari pihak - pihak terkait dalam pengelolaan BMD, sehingga diterbitkanlah beberapa regulasi yang mengatur pengelolaan BMD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mewujudkan komitmennya untuk dapat mengelola BMD secara tertib.

Berikut merupakan gambar halaman log in untuk masuk aplikasi SIM BMD sebagai bentuk penerapan aplikasi SIM BMD :



Gambar 2. Halaman log in Aplikasi SIM BMD

Pengelolaan barang milik daerah merupakan peranan dari administrasi publik, sebab dalam proses pengelolaan aset atau barang milik daerah ada peran penting bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan strategi pengelolaan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya, DS dalam hasil wawancara menjelaskan penerapan sistem informasi manajemen barang milik daerah dengan kutipan sebagai berikut:

” Jadi, Sistem informasi manajemen barang milik daerah (SIM-BMD) merupakan sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah. SIM-BMD diterapkan dalam menginventaris semua barang yang dimiliki sebagai aset daerah serta sebagai sarana penunjang untuk mempermudah pengurus barang dan peran kami dengan kemudahan aplikasi yang ada dapat mengoptimalkan kinerja sehingga dapat menyuguhkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan” (IK3).

Penerapan SIM-BMD diharapkan dapat mempermudah pengelolaan barang milik daerah mulai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah-tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Banyaknya kemudahan – kemudahan dari SIM BMD ini, memberikan manfaat bagi pengurus barang di masing masing OPD. Lebih lanjut dijelaskan dalam kutipan sebagai berikut :

“Dari yang saya amati sejauh ini ya mbak, untuk pelaporan barang sudah tepat waktu dan sangat membantu dalam pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah” (IK1).

Mekanisme Pencatatan dan pengelolaan BMD selayaknya menganut prinsip-prinsip manajemen aset daerah. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan manajemen aset tersebut dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap penghapusan aset. Mekanisme Pencatatan dan pengelolaan BMD melalui SIM BMD seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen aset daerah yakni: pada saat pembelian harus dilengkapi dengan dokumen transaksi, pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan/administrasi secara baik , pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi

B. Kendala Dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD)

Pada pelaksanaannya, pembantu pengurus barang masing masing bagian dalam menerapkan SIM BMD memiliki beberapa kendala diantaranya dijelaskan :

” Masih ada data aset yg masih salah entri tahun perolehan, tetapi data tersebut telah di kunci dari admin utama” (IK4).

Penyajian data yang akurat, sangat berpengaruh terhadap laporan BMD yang dihasilkan. Sebelum menginput data pada aplikasi SIM BMD, pembantu pengurus barang harus memastikan bahwa data awal harus benar. Jika terdapat kesalahan pencatatan aset, masih memungkinkan untuk mengubah data melalui menu edit. Akan tetapi, pengeditan data hanya bisa dilakukan jika data yang sudah diinput, belum diverifikasi oleh admin. Hal yang sama diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

“Ditemukan perbedaan data, pada laporan aset. Jika inventarisasi tidak berjalan dengan baik maka akan terdapat perbedaan antara catatan inventarisasi dengan kondisi aset dilapangan, yang jika dibiarkan akan

menimbulkan kehilangan aset dan tidak seimbangnya nilai pada laporan keuangan dan aset yang dimiliki suatu daerah saat penyusunan necara” (IK3).

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Inventarisasi paling tidak dilakukan satu (1) kali dalam lima (5) tahun. Pentingnya Inventarisasi harus dilakukan agar diketahui secara jelas nilai aset/kekayaan daerah yang saat ini berada lingkungan daerah. Banyak aset-aset yang tidak diketahui keberadaannya, dan hal ini sudah menjadi temuan bagi instansi pemeriksa BPK-RI. Permasalahan ini dikarenakan tidak tertibnya pengelola barang pada instansi daerah.

Dengan melaksanakan upaya upaya pembenahan dibidang aset, diharapkan terwujudnya penertiban dan pengamanan BMD secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif teknis maupun hukum, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan BMD yang baik dan benar. Hal ini harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten (berlatar belakang teknologi informasi) sehingga mampu mengoperasikan aplikasi SIM BMD agar mempermudah koordinasi dalam proses penatausahaan aset.

C. Manfaat dan Dampak penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD) pada transparansi dan akuntabilitas

Penerapan sebuah sistem informasi manajemen pasti memberikan dampak bagi pemakai sistem informasi tersebut, baik dampak positif maupun negatif. Sama halnya dampak dari penerapan SIM BMD dalam proses penatusahaan barang milik daerah. Beberapa manfaat atau peranan serta fungsi sistem informasi diantaranya ialah Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem informasi, mengembangkan proses perencanaan aset atau barang milik daerah yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi, Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi - transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kutipan :

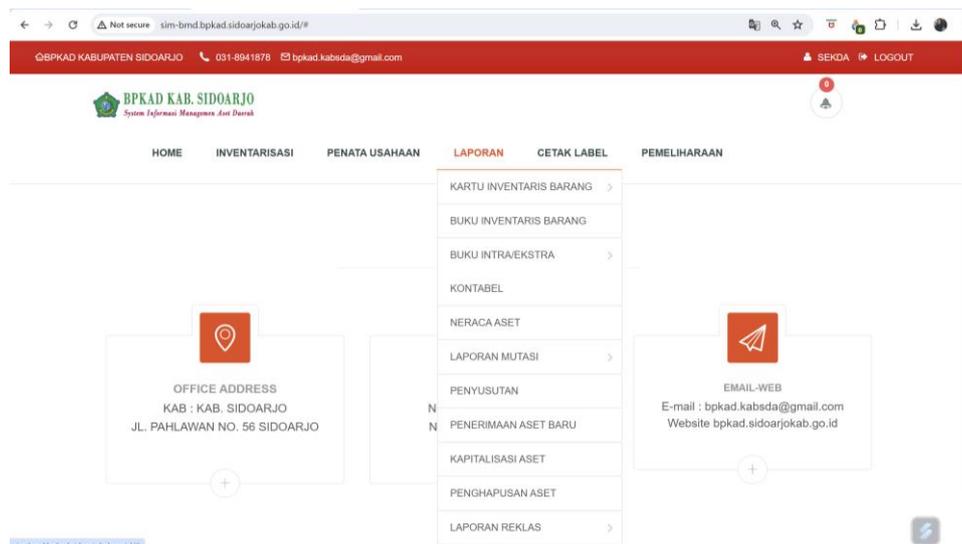
“...tentunya mbak. SIM-BMD telah memberikan dampak positif pada transparansi dan akuntabilitas di Sekretariat Daerah. Semua sudah by sistem. Jadi lebih mudah saya menyusun laporan BMD” (IK2).

Melalui pelaksanaan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) nantinya diharapkan akan menghasilkan rekomendasi pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah yang transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai pelaporan keuangan dan aset daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Hal ini sejalan dengan pernyataan informan :

“ Iya, untuk pemeriksaan dan pelaporan lebih mudah. Jika diminta data kapanpun, bisa diakses sewaktu waktu melalui SIM BMD ini, karena outputnya banyak dari data KIB A-E, data penyusutan hingga penghapusan. Lengkap semua ada ” (IK4).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kemudahan dan kelengkapan dalam mengakses informasi laporan BMD melalui Sistem Informasi Barang Milik Daerah baik sejauh ini. Tercermin dari ketepatan laporan barang pengguna tiap triwulan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan OPD. Disamping itu, laporan barang yang disajikan juga dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas proses tercermin dari adanya kejelasan sistem informasi dalam pencatatan Barang Milik Daerah. Dalam hal ini informasi atas Barang Milik Daerah tercantum pada Kartu Inventaris Barang (KIB) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain: kesediaan dan aksesibilitas dokumen , kejelasan dan kelengkapan informasi , Keterbukaan proses , kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Berikut beberapa data atau laporan barang pengguna yang bisa diakses melalui SIM BMD yang meliputi kartu inventaris barang (KIB), laporan mutasi barang, penyusutan, hingga penghapusan aset.



Gambar 3. Tampilan menu laporan SIM BMD

D. Keterkaitan dan Pembaruan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM BMD)

Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM-BMD) merupakan aplikasi pengelolaan aset daerah atau BMD. Penerapan teknologi informasi dalam manajemen aset publik merupakan langkah maju dalam memodernisasi administrasi publik. Ini sesuai dengan literatur yang menekankan pentingnya inovasi dalam peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan publik, yang keduanya adalah komponen penting dalam menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan dalam kutipan sebagai berikut :

“Dari perspektif inovasi, penerapan teknologi informasi dalam manajemen aset publik merupakan langkah maju dalam memodernisasi administrasi publik. Ini sesuai dengan literatur yang menekankan pentingnya inovasi dalam peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan publik, yang keduanya adalah komponen penting dalam menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas” (IP1).

Pemerintah daerah dalam hal ini harus berinovasi terkait integrasi antara sistem informasi BMD dengan sistem informasi keuangan (SIM BMD dengan SIKSDA) guna menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan dan memberikan porsi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga terwujud kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Peran Pendidikan tinggi sendiri bisa melalui penyediaan tenaga ahli, kemitraan dengan pemerintah dan industri, serta pendidikan masyarakat, perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan perubahan positif. Seperti yang sudah terlaksana yaitu MOU antara UMSIDA dengan BKD Kabupaten Sidoarjo melalui program akselerasi talenta ASN. Bentuk kolaborasi dapat diwujudkan yang salah satunya adalah bersinergi dalam bidang pengembangan informasi. Dengan bekerjasama yakni dari perguruan tinggi menyediakan keahlian teknis dan sumber daya manusia, sementara pemerintah dapat menyediakan wawasan domain dan akses ke data yang diperlukan. Salah satu Informan dalam pernyataannya ;

“Peran Pendidikan tinggi sendiri bisa melalui penyediaan tenaga ahli, kemitraan dengan pemerintah dan industri, serta pendidikan masyarakat, perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan perubahan positif. Seperti yang sudah terlaksana yaitu MOU antara UMSIDA dengan BKD Kabupaten Sidoarjo melalui program akselerasi talenta ASN” (IP1).

Diharapkan kedepannya adanya sinergi antara. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, masyarakat sipil, bisnis, dan organisasi non-profit. Kolaboratif yang diharapkan meliputi kerjasama yang lebih mendalam dan terstruktur guna mencapai tujuan bersama. Data hasil penelitian menjelaskan tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM-BMD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bahwasannya tidak ada kendala yang cukup serius, Namun yang terjadi dilapangan sering ditemukan perbedaan data, pada laporan aset dalam suatu daerah. Jika inventarisasi tidak berjalan dengan baik maka akan terdapat perbedaan antara catatan inventarisasi dengan kondisi aset dilapangan, yang jika dibiarkan akan menimbulkan kehilangan aset dan tidak seimbangny nilai pada laporan keuangan dan aset yang dimiliki suatu daerah saat penyusunan necara. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM-BMD) dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah. Karena sejauh ini di Pemerintah

kabupaten Sidoarjo penerapan SIM-BMD dapat mempermudah pendataan barang (Identitas, harga, tahun pembuatan dan siapa yang bertanggungjawab. Pelaporan BMD dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang terlibat langsung maupun pihak luar yang membutuhkan.

Disimpulkan bahwa pengelolaan BMD dengan aplikasi SIM-BMD sudah efektif dan faktor yang mempengaruhi efektifitasnya adalah dikarenakan output yang dihasilkan oleh aplikasi SIM-BMD dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna [15]. Terkait dengan akuntabilitas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Shabrina kembali bertolak belakang dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti. Shabrina menyatakan bahwa kegiatan pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya belum efektif secara administrasi, fisik, dan hukum, namun sudah akuntabel [1].

IV. SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan makalah tersebut dapat penulis simpulkan bahwa aplikasi SIM-BMD yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai aplikasi pengelola aset secara terintegrasi cukup baik dalam membantu pemerintah mengelola barang milik daerah. Tujuan penggunaan sistem informasi manajemen barang milik daerah (SIM-BMD) antara lain adalah tercapainya hasil pendataan aset daerah secara akurat, teknis perencanaan yang tepat baik pengamanan ataupun pemindahtanganan. Implementasi sistem informasi manajemen barang milik daerah (SIM-BMD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah kabupaten Sidoarjo bahwasannya sudah cukup baik, namun yang terjadi dilapangan sering ditemukan perbedaan data, pada laporan aset dalam suatu daerah. Jika inventarisasi tidak berjalan dengan baik maka akan terdapat perbedaan antara catatan di kartu inventaris barang (KIB) dengan kondisi aset dilapangan, yang jika dibiarkan akan menimbulkan kehilangan aset dan tidak seimbang nilai pada laporan keuangan dan aset yang dimiliki suatu daerah saat penyusunan neraca. Transparansi dan Akuntabilitas SIM-BMD yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berjalan cukup baik, namun perlu pengembangan dan pembaruan agar lebih efektif dalam penggunaannya.

Pada penelitian ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan berinovasi dalam bidang teknologi informasi khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Salah satu upaya Pemerintah adalah mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan BMD dengan sistem informasi keuangan yaitu SIM BMD dengan SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo) guna mendorong terwujudnya Pemerintah yang bersih, transparan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem Informasi tersebut diharapkan mampu menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data atau informasi keuangan daerah antara pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan kebijakan.

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM-BMD) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam penelitian ini, pengelolaan barang Milik Daerah yang diteliti masih bersifat pengelolaan BMD secara umum, belum mengerucut pada masing-masing tahap pengelolaan BMD mengingat keterbatasan waktu penelitian

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa dengan selesainya penulisan artikel ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak serta adanya bimbingan dari dosen pembimbing. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia membantu dan terlibat dalam penyelesaian penulisan artikel ini. Khususnya kepada kedua orangtua yang telah memberikan dukungan secara materi dan moril selama perkuliahan, selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada teman hidup yang telah bersedia memberikan dukungan dan motivasi dengan tulus, kemudian yang terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah memberikan motivasi selama penulisan artikel ini

REFERENSI

- [1] K. Nur Shabrina, "Kebijakan dan Manajemen Publik Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya," *Kebijak. dan Manaj. Publik*, vol. 1, no. ISSN 2303-341X, 2014.
- [2] O. Erfin Eko Bintoro Setyo Haryanto, I. Nyoman Sumaryadi, and D. Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana, "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat," *Journal Visioner*, vol. 11 No.4, pp. 551–567, 2019.
- [3] F. Muhamad, A. Dwiharyadi, and Yuhefizar, "Analisis Faktor-Faktor Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Perihal Pemanfaatan Aplikasi e-BMD Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi," *Akunt. dan Manaj.*, vol. 17, no. 2, pp. 41–57, 2022, doi:

- 10.30630/jam.v17i2.200.
- [4] “Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021”.
- [5] S. Biduri, R. A. Rahayu, and I. Mukarromah, “Implementasi PSAK No. 45 pada Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Demi Terciptanya Transparansi dan Akuntabilitas,” *J. Semin. Nas. dan 6th Call Syariah Pap. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, no. 45, pp. 222–235, 2019.
- [6] “Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022.”
- [7] E. P. A. Tarigan, “Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah,” *J. Kebijak. Adm. Publik*, vol. 17, no. 1, 2013.
- [8] H. M. P. U. edan A. Sir, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam Pengelolaan Barang milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu,” 2020.
- [9] J. M. F. Mahayuddin, “EVALUATION OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF REGENCY ASSETS (SIMDA-BMD) TO SUPPORT THE ASSETS INVENTORY OF PENDAHULUAN Perkembangan merupakan deret Memperkuat teknologi angka dan yang kesatuan dan nasional , (4) Mewujudkan pemerintahan bangsa di tin,” *J. Komun. KAREBA*, vol. 5, no. 1, 2016.
- [10] I. Hari Putra, S. Usman Ismanto, N. Runiawati, M. Daerah, B. Milik Daerah, and D. Dan Mclean, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda Bmd) Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung,” *JANE (Jurnal Adm. Negara)*, vol. 14 No. 01, pp. 238–255, 2022.
- [11] Supriyanto, “Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah,” *J. Akunt. Univ. Jember*, vol. 13 No.2, 2015.
- [12] H. Idris and W. Syachbrani, “Economics and Digital Business Review Studi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah pada Pemerintah,” vol. 4, no. 1, pp. 25–32, 2023, doi: 10.37531/ecotal.v4i1.278.
- [13] Yohanes, A. Pala, A. Lassa, and A. L. Tiza, “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam Pengelolaan Aser dan Barang pada Badan Ksatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara,” *INNOVATIVE*, vol. 1, no. 2, pp. 663–672, 2021.
- [14] A. Riestanty and J. Murwani, “Pengamanan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun,” *ASSETS J. Akunt. dan Pendidik.*, vol. 8 No. 01, no. p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995, p. Hlmn. 47-56, 2019.
- [15] Saa’dillah, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) Dalam Pengelolaan BMD di Pemerintah Kabupaten Landak,” *J. Audit dan Akunt. Fak. Ekon. dan Bisnis Univ. Tanjungura*, vol. 5, 2016.
- [16] I. K. W. Aditya Arya Vikrama, Tedi Erviantono, “Evaluasi Transparansi Dan Akuntabilitas Inventarisasi BMD pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli,” pp. 1–9, 2015.
- [17] A. Ramanda, S. Safuan, and M. A. Alhabshy, “Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi Simda Keuangan Dan Simda Bmd),” *Syntax Lit. ; J. Ilm. Indones.*, vol. 6, no. 2, p. 1585, 2021, doi: 10.36418/syntax-literate.v6i2.5349.
- [18] R. K. Yin, *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- [19] J. Silvia, N. I. M. C. Mahasiswa, and M. Ansar, “(STUDI FENOMENOLOGIS PADA GEREJA PROTESTAN INDONESIA DONGGALA JEMAAT MANUNGGAL PALU) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , 21-22 Juli 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , 21-22 Juli 2011,” pp. 21–22, 2011.
- [20] L. L. Aimbun, D. P. E. Saerang, and H. Gamaliel, “Analisis Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud),” *J. Ris. Akunt. Dan Audit. “Goodwill,”* vol. 8, no. 1, pp. 170–180, 2017, doi: 10.35800/jjs.v8i1.15357.
- [21] BPK, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).,” 2010, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [22] Y. A. Azis, “Fokus Penelitian Adalah: Pengertian dan Contoh,” *Deep. Store*, no. 2014, pp. 1–17, 2022.
- [23] D. A. N. Aset and D. Kabupaten, “TES IS HAMDY MUHAMMAD SIR PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN,” 2020.
- [24] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [25] Info.populix.co, “Data Primer: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya,” *Info.populix.co*, pp. 1–7, 2020.
- [26] V. Site, “Buy and Sell on Marketplace Data Sekunder Kelebihan dan Kekurangan Data Sekunder,” pp. 3–6, 2023.
- [27] I. Demara Syahfitri and M. Ahyaruddin, “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Inventarisasi Sensus Barang Milik Daerah (SIMFONI BMD) Pada BPKAD Kota Pekanbaru,” *JIMPS J. Ilm. Mhs. Pendidik. Sej.*, vol. 8, no. 4, pp. 5173–5177, 2023.

- [28] Sugiyono, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [29] L. J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- [30] U. Salamah, "Pemanfaatan SABDA dalam Inventarisasi Aset Daerah guna Mendukung Penerapan E-Government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan," *Univ. Negeri Surabaya*, 2015.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.